



## NEGARA KESEJAHTERAAN DAN EKONOMI KERAKYATAN: ANALISIS PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAWA 2025-2029

Baiq Jingga Humaira<sup>1</sup>, Delila Rafika Sari<sup>2</sup>, Erifarhany Satilla Kusnadi<sup>3</sup>, Mifta Hafiyandini<sup>4</sup>, Praja Alim Zamzani<sup>5</sup>, Titan Jafta Sankana<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[baiqjinggahumaira@icloud.com](mailto:baiqjinggahumaira@icloud.com)

[delilarafika@gmail.com](mailto:delilarafika@gmail.com)

[riririri005@gmail.com](mailto:riririri005@gmail.com)

[miftahafiyandini@gmail.com](mailto:miftahafiyandini@gmail.com)

[prajaalim2605@gmail.com](mailto:prajaalim2605@gmail.com)

[titanjafta@gmail.com](mailto:titanjafta@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Kajian ini menelusuri dinamika perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa menjelang penyusunan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029. Melalui wawancara mendalam dengan Bappeda, penelaahan dokumen resmi, dan observasi lapangan, penelitian memetakan bagaimana paradigma negara kesejahteraan—dengan ekonomi kerakyatan ala Mubyarto sebagai poros—diterjemahkan ke dalam kebijakan teknokratis yang tetap sensitif pada konteks lokal. Hasilnya menunjukkan, pertama, penetapan target pembangunan didorong oleh sinergi antara pendekatan partisipatif, teknokratis, dan politis, namun dibatasi realitas fiskal: PAD hanya  $\pm 10\%$  dari APBD Rp2 triliun sehingga ketergantungan transfer pusat mencapai 90%. Kedua, strategi menjadi *lokus* program nasional (industri garam, peningkatan layanan dasar) terbukti krusial untuk menutup celah pendanaan, sekaligus menuntut komunikasi intensif dengan kementerian/lembaga agar usulan daerah masuk RPJMN. Ketiga, koordinasi lintas sektor—terutama pada indikasi KLB rabies—menjadi

kunci mencegah tumpang-tindih program dan memastikan capaian indikator literasi, numerasi, serta stunting dalam RKPD tahunan. Keempat, pengembangan pariwisata berbasis bahari, budaya, dan minat khusus dihadang kendala infrastruktur, keterbatasan SDM, dan ketergantungan pada event; meski demikian, pelibatan masyarakat lewat promosi digital memperlihatkan potensi ekonomi kreatif yang inklusif. Kelima, pendidikan berbasis potensi lokal (ekskul surfing, heritage walk) dan implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila memperkuat karakter pelajar sekaligus menyiapkan agen promosi budaya. Terakhir, konflik tenurial atas lahan publik (PLTU, tambang) menegaskan pentingnya kejelasan hukum hak ulayat dan dialog multistakeholder agar proyek strategis tidak terhambat. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Sumbawa bertumpu pada kemampuan menjahit visi kesejahteraan dengan keterbatasan fiskal, mengelola koordinasi sektoral, serta memitigasi konflik sosial demi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** RPJMD, ekonomi kerakyatan, koordinasi sektoral, fiskal daerah, pariwisata berkelanjutan, Profil Pelajar Pancasila, konflik tenurial

### ABSTRACT

This study explores the dynamics of development planning and implementation in Sumbawa Regency ahead of the formulation of the 2025-2045 Long-Term Regional Development Plan (RPJPD) and the 2025-2029 Medium-Term Regional Development Plan (RPJMD). Through in-depth interviews with Bappeda (Regional Development Planning Agency), official document analysis,

and field observations, the research maps how the welfare state paradigm—with Mubyarto's concept of a people-centered economy at its core—is translated into technocratic policies that remain sensitive to local contexts. The findings reveal several key points. First, the determination of development targets is driven by a synergy of participatory, technocratic, and political approaches, yet constrained by fiscal realities: local revenue (PAD) contributes only around 10% of the Rp2 trillion regional budget, making the region 90% dependent on central government transfers. Second, the strategy of becoming a national program locus (e.g., salt industry development, improvement of basic services) proves crucial for closing funding gaps, while requiring intensive communication with ministries and agencies to ensure local proposals are included in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Third, cross-sectoral coordination—particularly in response to the rabies outbreak—becomes essential to prevent program overlap and to secure progress on annual RKPD targets such as literacy, numeracy, and stunting indicators. Fourth, the development of tourism based on maritime, cultural, and niche interests faces challenges in infrastructure, limited human resources, and overreliance on events; nevertheless, community involvement through digital promotion showcases the inclusive potential of the creative economy. Fifth, education rooted in local potential (e.g., surfing extracurriculars, heritage walks) and the implementation of the Pancasila Student Profile Project strengthen student character while preparing cultural promotion agents. Finally, tenurial conflicts over public lands (e.g., power plants, mining) highlight the importance of legal clarity on customary rights and multistakeholder dialogue to prevent strategic projects from being stalled. These findings affirm that Sumbawa's success hinges on its ability to weave together a welfare vision with fiscal constraints, manage sectoral coordination, and mitigate social conflict in pursuit of just and sustainable development.

---

**Keywords:** RPJMD, people-centered economy, sectoral coordination, regional fiscal capacity, sustainable tourism, Pancasila Student Profile, tenurial conflict

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada era otonomi menuntut tata kelola yang tidak sekadar bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menegakkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan manfaat antar wilayah. Kabupaten Sumbawa, sebagai salah satu lumbung pangan dan kawasan pesisir strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghadapi tantangan ganda: pertama, menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang serasi dengan RPJPN; kedua, memastikan dokumen lima tahunan RPJMD 2025-2029 mampu memerinci kebutuhan masyarakat hingga pelosok terpencil. Dalam kerangka inilah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi sentral, terutama ketika pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis harus diorkestrasi secara selaras agar tidak terjebak pada “ritual” penyusunan dokumen belaka, tetapi benar benar menjelma sebagai peta jalan pembangunan.

Pilihan paradigma “negara kesejahteraan” yang digaribawahi Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberi dimensi ideologis tersendiri. Prinsip ekonomi kerakyatan ala Mubyarto—gotong royong, koperasi sebagai sokoguru, dan kedaulatan ekonomi lokal—didorong menjadi penyeimbang logika pasar yang kerap hanya mengejar efisiensi. Konteks nasional turut menguatkan pilihan itu lewat inisiatif Koperasi Merah Putih di setiap desa, sehingga sasaran daerah bukan sekadar mempertajam indikator makro seperti PDRB per kapita, tetapi juga memperbaiki akses layanan dasar, menekan stunting, serta membuka isolasi wilayah tertinggal melalui investasi infrastruktur berkeadilan seperti rekonstruksi jalan Batu Dulang-Tepal. Dengan demikian, Sumbawa berupaya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek formalitas statistik.

Namun idealisme tersebut bertemu realitas fiskal yang keras: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya berkisar Rp2 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah baru menyentuh 10 persen. Ketergantungan pada transfer pusat membuat ruang gerak anggaran daerah relatif sempit, sehingga strategi menjadi “lokus” program nasional—mulai dari industri garam hingga penguatan layanan dasar—menjadi keniscayaan. Persilangan antara keterbatasan fiskal,



keharusan koordinasi lintas sektor, serta potensi pariwisata yang tengah tumbuh (bahari, budaya, dan minat khusus) membentuk mosaik persoalan sekaligus peluang. Artikel ini lahir dari rangkaian wawancara dengan Bappeda, penelusuran kebijakan, dan observasi lapangan untuk memotret bagaimana Kabupaten Sumbawa menegosiasikan visi kesejahteraannya di tengah keterbatasan struktur anggaran dan dinamika kebijakan pusat daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Paradigma Negara Kesejahteraan dan Ekonomi Kerakyatan***

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) secara fundamental menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dalam hal ini, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi yang adil, perlindungan kelompok rentan, dan akses yang merata terhadap layanan dasar. Konsep ini bertolak belakang dengan paradigma neoliberal yang terlalu menekankan efisiensi dan pertumbuhan tanpa keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, negara kesejahteraan memperoleh dimensi lokal melalui gagasan ekonomi kerakyatan yang dipopulerkan oleh Prof. Mubyarto. Ekonomi kerakyatan mengedepankan prinsip gotong royong, koperasi sebagai sokoguru ekonomi, dan kedaulatan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini menjadi sangat relevan bagi daerah seperti Sumbawa yang menghadapi tantangan fiskal namun memiliki kekuatan dalam struktur sosial lokal dan solidaritas komunitas. Dengan mengembangkan koperasi desa, UMKM, dan aktivitas ekonomi berbasis masyarakat, pendekatan ekonomi kerakyatan menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan kapasitas fiskal.

### ***Ketergantungan Fiskal Daerah terhadap Pemerintah Pusat***

Ketergantungan fiskal menggambarkan kondisi di mana suatu daerah sangat mengandalkan transfer keuangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menciptakan keterbatasan dalam otonomi fiskal daerah, membatasi kreativitas anggaran, dan melemahkan kapasitas responsif terhadap kebutuhan lokal. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi, terutama di wilayah luar Jawa seperti Sumbawa, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil dibandingkan total APBD. Menurut Ananta et al. (2019), ketergantungan fiskal yang tinggi menimbulkan implikasi serius terhadap kemandirian daerah. Daerah cenderung pasif, menunggu program dari pusat, dan kesulitan dalam merespons kebutuhan mendesak karena keterikatan terhadap aturan penggunaan dana transfer. Oleh karena itu, diperlukan strategi fiskal inovatif seperti menjadi lokus program nasional atau mendorong kolaborasi pendanaan dengan pihak swasta dan donor. Penyesuaian dokumen RPJMD dengan RPJMN merupakan strategi penting agar program daerah diakomodasi dalam anggaran pusat.

### ***Peran Strategis Bappeda dalam Perencanaan dan Sinkronisasi***

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah institusi strategis yang berperan sebagai motor penggerak dan koordinator dalam seluruh proses pembangunan daerah. Fungsi Bappeda tidak hanya sebagai penyusun dokumen rencana pembangunan, tetapi juga sebagai fasilitator integrasi dan sinkronisasi antar program dan sektor. Peran ini menjadi sangat penting mengingat keragaman kebijakan sektoral dan dinamika politik pemerintahan. Dalam studi oleh Ajizah dan Wijaya (2021), Bappeda dijelaskan sebagai entitas kunci dalam memastikan harmonisasi kebijakan kepala daerah dengan kebutuhan teknokratis dan tuntutan partisipatif masyarakat. Bappeda juga menjadi penghubung antara kebijakan daerah dan pusat, misalnya dengan menyesuaikan program daerah ke dalam kerangka RPJMN agar memperoleh dukungan nasional. Kemampuan Bappeda dalam mengorkestrasi sinergi antar instansi, menjaga konsistensi program lintas tahun, serta menyusun indikator kinerja yang terukur menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh.*

### ***Pendidikan Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal***



Pendidikan tidak hanya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk identitas budaya dan karakter lokal. Dalam konteks daerah seperti Sumbawa, pendidikan yang terhubung dengan lingkungan dan warisan budaya lokal menjadi instrumen vital dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ekstrakurikuler seperti heritage walk, surfing, dan penguatan nilai-nilai sejarah lokal melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi bentuk nyata dari pendidikan kontekstual. Chotimah et al. (2018) menyatakan bahwa pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab siswa terhadap daerahnya. Hal ini tidak hanya membangun kompetensi akademik, tetapi juga memperkuat jati diri, menumbuhkan patriotisme, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem pendidikan. Pendidikan berbasis potensi lokal juga memiliki dimensi ekonomi karena dapat mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

### ***Konflik Tenurial dan Tata Kelola Lahan dalam Pembangunan Daerah***

Konflik tenurial adalah bentuk sengketa kepemilikan atau penguasaan atas lahan yang biasanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, perusahaan, atau pihak swasta lainnya. Konflik ini umumnya mencuat di daerah yang memiliki riwayat penguasaan tanah berbasis adat atau komunitas tradisional, namun kemudian ditetapkan sebagai kawasan proyek pembangunan oleh negara atau pihak swasta. Di wilayah seperti Kabupaten Sumbawa yang sedang mengembangkan berbagai proyek infrastruktur dan energi seperti PLTU, fenomena ini menjadi isu yang sangat relevan dan krusial. Secara substansial, konflik tenurial mencerminkan benturan antara sistem hukum formal negara dan hukum adat atau sistem penguasaan lahan tradisional. Pemerintah sering mengklaim tanah sebagai aset negara berdasarkan sertifikat atau penetapan kawasan hutan, sementara masyarakat mengklaim tanah tersebut berdasarkan sejarah pengelolaan turun-temurun, warisan leluhur, atau keberadaan situs budaya seperti kuburan adat. Dalam konteks pembangunan, ketegangan ini tidak hanya memperlambat proyek, tetapi juga dapat menimbulkan krisis sosial, melemahkan legitimasi pemerintah, dan merusak hubungan negara dengan warga lokal. Watoni (2023) dalam studinya menunjukkan bahwa eskalasi konflik tenurial dapat terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu: (1) lemahnya pengakuan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat; (2) minimnya partisipasi warga dalam perencanaan proyek pembangunan; (3) ketidakjelasan status lahan di banyak wilayah, serta (4) kurangnya mediasi atau mekanisme penyelesaian konflik yang berpihak pada keadilan sosial. Dalam studi kasus di Sumbawa dan Lombok Timur, Watoni mencatat bahwa ketegangan dapat meningkat menjadi konflik terbuka apabila tidak segera direspons secara partisipatif dan transparan. Dampak dari konflik tenurial tidak hanya terbatas pada proyek yang bersangkutan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi dan stabilitas sosial. Investor enggan menanamkan modal di wilayah yang memiliki catatan konflik lahan, dan masyarakat bisa mengalami kehilangan akses terhadap lahan produktif yang menjadi sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu, tata kelola lahan yang inklusif dan berbasis pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Besar berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAPPEDA. Penelitian deskriptif kualitatif menekankan pada upaya mengungkap makna di balik praktik kebijakan, khususnya dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan daerah, sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2014) bahwa pendekatan ini cocok untuk memahami realitas sosial dari perspektif partisipan.

### **Jenis dan Sumber Data**



Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan dua sumber utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat teknis atau perencana di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Besar. Informan dipilih berdasarkan keterlibatannya langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana kerja tahunan (RKPD), laporan evaluasi, serta regulasi dan arsip berita lokal yang relevan. Kedua jenis data ini dipergunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika pembangunan daerah.

### **Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Wawancara bersifat semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan menjawab secara reflektif dan luas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi kami untuk menggali informasi secara fleksibel dan mendalam. Selain wawancara, kami mengumpulkan dokumen-dokumen perencanaan dan laporan evaluasi dari BAPPEDA sebagai bahan perbandingan dan pelengkap untuk menilai konsistensi antara pernyataan informan dengan kebijakan yang tertulis. Metode triangulasi sumber ini, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), digunakan untuk meningkatkan keabsahan data melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai teknik dan sumber.

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Pembangunan daerah pada era otonomi saat ini menuntut sebuah pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial, pemerataan layanan dasar, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, tantangan ini menjadi semakin kompleks mengingat posisi fiskalnya yang terbatas, karakteristik sosial budaya yang khas, dan kebutuhan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas nasional. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang digunakan tidak bisa semata-mata berlandaskan pada paradigma liberalisme ekonomi yang hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan. Sebaliknya, Sumbawa mengambil pendekatan alternatif berbasis paradigma negara kesejahteraan dan diperkuat oleh ekonomi kerakyatan ala Mubyarto, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis bagaimana Kabupaten Sumbawa membangun sistem perencanaan pembangunan daerah yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal. Dalam hal ini, peran Bappeda menjadi institusi kunci dalam mengoordinasikan penyusunan RPJMD 2025-2029 agar selaras dengan RPJPD dan RPJPN, serta merespons berbagai isu sektoral, mulai dari layanan dasar, ketahanan pangan, pendidikan kontekstual, hingga konflik tenurial.

Teori yang mendasari kerangka pemikiran ini adalah teori kebijakan publik dalam konteks desentralisasi dan perencanaan partisipatif, yang menekankan pentingnya kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan berdasarkan karakteristik lokal, namun tetap dalam koridor regulasi nasional. Dalam konteks ini, pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif dijadikan sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Teori ini dipadukan dengan paradigma welfare state yang menekankan tanggung jawab negara (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan lingkungan.

Lebih lanjut, gagasan ekonomi kerakyatan digunakan sebagai landasan normatif dalam menjawab persoalan ketimpangan dan keterbatasan fiskal. Pemikiran Mubyarto tentang ekonomi berbasis koperasi, gotong royong, dan kedaulatan komunitas lokal menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana pendekatan pembangunan daerah bisa tetap inklusif di tengah minimnya PAD. Integrasi inisiatif seperti Koperasi Merah Putih, penguatan UMKM, dan pariwisata berbasis



budaya lokal menjadi instrumen pembangunan alternatif yang menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan aspirasi masyarakat.

Kerangka pemikiran ini juga melihat pentingnya strategi fiskal adaptif yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan dukungan pusat. Strategi menjadi “lokus” program nasional, penyelarasan RPJMD dengan RPJMN, serta komunikasi langsung antar pejabat daerah dan pusat merupakan taktik politik fiskal yang menunjukkan bahwa daerah tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan aktor strategis dalam pengelolaan sumber daya nasional.

Dengan merujuk pada kompleksitas tantangan pembangunan daerah—mulai dari konflik tenurial, keterbatasan fiskal, hingga pentingnya pendidikan kontekstual—kerangka pemikiran ini merumuskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya tergantung pada kelengkapan dokumen rencana, tetapi juga pada kemampuan daerah membangun narasi pembangunan yang berpihak pada rakyat dan mampu menegosiasikan kebutuhan lokal di ruang kebijakan nasional. Dalam posisi inilah, peran Bappeda, partisipasi masyarakat, dan keberpihakan ideologis terhadap prinsip keadilan sosial menjadi penentu keberlanjutan pembangunan di Sumbawa.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kondisi Terkini Kabupaten Sumbawa Besar dalam Penetapan Target Pembangunan**

Setelah mendapat informasi dengan melakukan wawancara serta data-data pendukung dari Bappeda kabupaten Sumbawa Besar. Kondisi terkini dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), saat ini sedang melaksanakan proses penyusunan arah kebijakan dan penetapan target pembangunan daerah untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Kegiatan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan yang telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, teknokratis, dan politis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, Kabupaten Sumbawa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Dokumen ini merupakan pedoman pembangunan jangka panjang selama 20 tahun ke depan dan disusun secara terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam pelaksanaannya, target-target strategis yang tertuang dalam RPJPD kemudian dijabarkan ke dalam RPJMD lima tahunan. Saat ini, Bappeda Kabupaten Sumbawa sedang mempersiapkan perencanaan awal untuk RPJMD periode 2025-2029, yang akan menjadi dokumen kunci dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun mendatang.

Dalam menyusun arah pembangunan tersebut, Kabupaten Sumbawa mengambil posisi tegas terhadap paradigma pembangunan yang ingin dikembangkan, yakni pembangunan dalam kerangka negara kesejahteraan. Pandangan ini mengandung makna bahwa negara harus hadir dalam menjamin pemerataan pembangunan, pemenuhan layanan dasar, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan kelompok rentan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan yang diambil oleh daerah tidak sepenuhnya berorientasi pada liberalisme pasar maupun pendekatan sentralistik, melainkan menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai titik tengah yang kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal.

Prinsip ekonomi kerakyatan yang dimaksud berakar pada pemikiran Prof. Mubyarto, yang menekankan pentingnya gotong royong, kemandirian ekonomi masyarakat, dan penguatan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Gagasan ini dipandang selaras dengan cita-cita pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa, di mana masyarakat tidak hanya menjadi



objek pembangunan, tetapi turut berperan sebagai subjek utama dalam proses transformasi ekonomi dan sosial.

Pada level nasional, dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan telah ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia melalui inisiatif pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Instruksi tersebut menjadi salah satu bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat bawah dan direspon secara serius oleh Kabupaten Sumbawa melalui integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Ke depan, pemerintah daerah akan memastikan bahwa dukungan teknis dan kelembagaan terhadap gerakan koperasi rakyat menjadi bagian dari strategi pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, Kabupaten Sumbawa berharap dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara merata. Kabupaten Sumbawa memandang bahwa pembangunan harus dijalankan dalam kerangka negara kesejahteraan, yaitu dengan kehadiran negara dalam menjamin pemerataan hasil pembangunan, pelayanan dasar, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, paradigma pembangunan yang diambil tidak sepenuhnya liberal maupun sosialistik, melainkan berada di tengah dengan mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan. Konsep ini berakar pada pemikiran Prof. Mubyarto, yang menekankan pentingnya gotong royong, koperasi, serta kedaulatan ekonomi lokal. Dalam konteks nasional, komitmen terhadap ekonomi kerakyatan diperkuat dengan arahan Presiden RI untuk membentuk Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan sebagai manifestasi keberpihakan kepada masyarakat bawah. Kabupaten Sumbawa akan turut mendorong kebijakan ini secara teknis dan kelembagaan dalam dokumen perencanaannya.

Pembangunan di Kabupaten Sumbawa dirancang secara sistematis dan berjenjang, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 sebagai arah pembangunan 20 tahun, kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 untuk periode lima tahunan, dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang bersifat tahunan. RPJMD Kabupaten Sumbawa wajib mengadopsi dan menyelaraskan sasaran pembangunan dari RPJPN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, penetapan target pembangunan dilakukan dengan pendekatan sinkronisasi antar level pemerintahan guna menjamin kesinambungan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029, fokus utama penetapan target pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah tertinggal. Di bidang pendidikan, perhatian tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga peningkatan kualitas melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Program prioritas mencakup pembangunan, rehabilitasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Di sektor kesehatan, penekanan diberikan pada peningkatan akses layanan dasar, penguatan sumber daya manusia medis, dan pengembangan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah terpencil. Sementara itu, pembangunan infrastruktur wilayah tertinggal menjadi prioritas strategis, seperti pada proyek rekonstruksi jalan Batu Dulang-Tepal yang bertujuan membuka isolasi wilayah selatan Kabupaten Sumbawa. Meskipun proyek ini membutuhkan biaya tinggi dengan penerima manfaat langsung yang terbatas, pendekatan pembangunan tetap berlandaskan pada asas keadilan sosial dan tanggung jawab negara untuk menghadirkan pelayanan di seluruh wilayah. Hal ini menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Sumbawa tidak hanya mempertimbangkan efisiensi investasi sebagaimana dalam pendekatan ekonomi liberal, tetapi lebih menekankan peran negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warganya sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.



Penetapan target pembangunan di Kabupaten Sumbawa didasarkan pada perpaduan antara pendekatan teknokratis dan politis. Visi dan misi kepala daerah terpilih menjadi pijakan awal yang substansial, kemudian diterjemahkan secara teknokratis ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kekhususan masing-masing; apa yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah seperti Lombok belum tentu relevan dengan kondisi geografis, demografis, dan sosial-budaya di Sumbawa. Oleh karena itu, target pembangunan disusun secara adaptif, dengan mempertimbangkan potensi lokal, kondisi objektif masyarakat, serta daya dukung wilayah, namun tetap dalam bingkai arah kebijakan nasional. Pendekatan ini menjadi cerminan dari pembangunan berbasis negara kesejahteraan, yang menempatkan negara sebagai pelayan seluruh masyarakat, berbeda dengan pendekatan pembangunan berbasis pasar atau liberalisme murni yang lebih menekankan efisiensi ekonomi tanpa jaminan keadilan sosial.

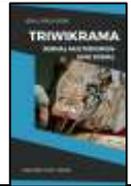
### **Pentingnya Koordinasi Sektoral dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam Pembangunan Daerah**

Koordinasi sektoral merupakan fondasi utama dalam memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan secara sinergis, terukur, dan tidak saling tumpang tindih. Di Kabupaten Sumbawa, pendekatan ini diterapkan secara nyata melalui dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD), yang menetapkan indikator kinerja sektoral seperti tingkat literasi, numerasi, dan prevalensi stunting. Setiap sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi, memiliki peran strategis yang saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah bukan merupakan pekerjaan satu dinas saja, melainkan kolaborasi lintas sektor. Contohnya, permasalahan literasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Pendidikan, tetapi memerlukan dukungan Dinas Sosial dalam membantu keluarga tidak mampu, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan akses informasi, serta Dinas PUPR dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Begitu pula penanganan stunting membutuhkan kontribusi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan secara bersamaan. Tanpa koordinasi sektoral yang baik, dampaknya bisa fatal: program berjalan tumpang tindih, sumber daya menjadi sia-sia, dan target-target dalam RPJMD sulit tercapai. Untuk mencegah hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bappeda secara rutin melakukan rapat lintas sektor, evaluasi kinerja tahunan, serta penyesuaian program dan anggaran tahun berikutnya. Pendekatan ini dikenal sebagai perencanaan berbasis evaluasi, yakni menyusun program pembangunan berdasarkan kondisi aktual dan capaian kinerja sebelumnya.

Kondisi yang menuntut koordinasi lintas sektor juga terlihat dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB). Salah satu contoh nyata adalah rabies, yang dikategorikan sebagai penyakit zoonosis dan berpotensi memicu keresahan publik. Saat terjadi KLB rabies, permasalahan tidak lagi terbatas pada aspek medis, tetapi meluas menjadi krisis lintas sektor yang memerlukan penanganan cepat dan terkoordinasi antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan pusat karena keterbatasan kapasitas, baik dalam penyediaan vaksin dalam jumlah besar, tenaga ahli, maupun logistik. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan 10.000 vaksin rabies dalam waktu singkat, kabupaten tidak dapat memenuhinya sendiri tanpa bantuan dari Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, dampak KLB juga dirasakan oleh sektor pariwisata, ekonomi, dan kepercayaan publik. Penurunan jumlah wisatawan, terpuruknya UMKM, hingga krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi risiko nyata jika respons tidak cepat dan terkoordinasi. Oleh karena itu, koordinasi sektoral dan lintas kewenangan bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, responsif, dan berkeadilan.

### **Peran Bappeda Dan Kerangka Pembangunan Daerah**



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah badan yang memiliki peran sangat penting di bidang perencanaan pembangunan suatu daerah. Bappeda membantu Kepala Daerah untuk Menyusun kebijakan-kebijakan apa saja yang bisa dilakukan untuk perencanaan pembangunan dan melakukan penilaian atas pelaksanaannya. Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan yang harus sangat diperhatikan karena sangat penting juga strategis. Perencanaan pembangunan dapat menggambarkan posisi suatu daerah akan dibawa ke arah mana, sehingga perencanaan ini harus turut mempertimbangkan potensi juga sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Hakikatnya, pembangunan menunjukkan upaya yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat suatu negara untuk mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan baik dalam bentuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Perencanaan sebuah pembangunan harus dirancang sesuai dengan jangka waktu, biaya, juga hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan perencanaan yang berkualitas dan melibatkan orang-orang yang memiliki wawasan luas juga melakukan evaluasi agar hasil yang diharapkan dapat sesuai, karena baik atau buruknya pembangunan terletak di kualitas perencanaan yang telah direncanakan. Rangkaian perencanaan dan pembangunan dalam suatu daerah sangatlah kompleks yang melibatkan banyak faktor (Siti Nur Ajizah & Endra Wijaya, 2021).

Oleh sebab itu, dalam wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber, beliau menyatakan bahwasanya pelaksanaan desentralisasi, perencanaan pembangunan suatu daerah harus dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dapat selaras dengan kebutuhan, potensi, serta masalah yang dialami oleh masing-masing daerah. Tidak hanya itu, dalam pembantuan perencanaannya, pemerintah daerah wajib menyetarakan, menyinergikan, juga mengharmonisasikan perencanaannya di bawah koordinasi, sinkronisasi Bappeda. Sehingga akhirnya dapat terjadi keserasian juga efektifitas pelaksanaan pembangunan. Beliau juga menyatakan bahwasanya Bappeda berperan sangat penting dalam tercapainya visi serta tujuan dari pembangunan suatu daerah. Dalam proses perencanaannya, Bappeda tidak terbatas pada penyusunan rencana, tetapi ikut terlibat dalam memastikan agar pelaksanaan dari pembangunan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kondisi daerah. Beliau menyebutkan bahwa peran Bappeda dibagi menjadi tiga aspek penting yaitu, koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi. Ketiga aspek inilah yang menjadi kunci kesuksesan perencanaan juga pelaksanaan pembangunan di suatu daerah.

### **1. Koordinasi: Upaya menyeimbangkan semua aspek**

Koordinasi adalah peran yang sangat dibutuhkan untuk terciptanya keserasian serta efektivitas dalam sebuah program. Melalui koordinasi, Bappeda menyeimbangkan langkah-langkah dari instansi yang bertujuan agar visi yang dibuat dapat dicapai. Contohnya, saat terjadinya stunting, Dinas Kesehatan menyediakan data dan juga program gizi, Dinas Pendidikan memberikan edukasi gizi untuk anak-anak di dekolah, dan Dinas Sosial memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dengan kondisi yang matang, maka setiap instansi dapat bergerak secara seimbang dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2. Integrasi: Menghubungkan program pusat dan daerah**

Selain bertanggung jawab terhadap koordinasi, Bappeda juga bertanggung jawab dalam aspek integrasi yang berguna untuk menyelaraskan program-program dari pemerintah pusat dan daerah agar terjadinya keserasian serta sinergi. Misalnya, Kementerian Kesehatan mempunyai program "Puskesmas Siaga" dan Sumbawa ingin menjadikan program tersebut menjadi bagian dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dalam konteks ini, Bappeda memastikan kegiatan dari pusat terintegrasi ke perencanaan daerah, yang tentunya harus tetap sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan visi Sumbawa. Hal ini bertujuan demi terciptanya efisiensi serta membuat program-program saling mendukung.



### **3. Sinkronisasi; Mengatur jadwal dan Lokasi pelaksanaan**

Dalam beberapa kejadian, sering muncul permasalahan yang ditimbulkan dari sinkronisasi. Contohnya sebuah jalan yang dibuat oleh Dinas PUPR harus dibongkar karena Dinas Air sedang memasang pipa di tempat yang sama. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jadwal juga Lokasi kerja. Oleh karena itu sinkronisasi juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Dalam konteks ini, Bappeda bertanggung jawab untuk mengatur program-program, menentukan mana yang prioritas, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efisien.

Dapat disimpulkan bahwa peran dari Bappeda bukan hanya sebagai perencana, tapi juga sebagai coordinator, integrator, serta sinkronisator. Peran-peran tersebut dapat membantu perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan visi, misi, kebutuhan, serta potensi daerah yang akhirnya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkesinambungan.

### **Potensi Pariwisata Sumbawa Dan Tantangannya**

Berdasar dari hasil wawancara yang kami lakukan, pariwisata wilayah Sumbawa memang menjadi sektor penting yang Tengah dikembangkan sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat. Dalam usaha pengembangannya, pemerintah tidak bergantung hanya pada kebijakan ataupun anggaran, tapi pemerintah juga melibatkan peran dari masyarakat serta pendekatan kreatif. Narasumber menyebutkan bahwa potensi pariwisata Sumbawa dibagi dalam tiga aspek utama yakni klasifikasi pariwisata, peran masyarakat dalam diplomasi, serta tantangan yang terus dihadapi. Ketiga aspek inilah yang menjadi fokus penting pemerintah yang harus diperhatikan demi mewujudkan pariwisata Sumbawa yang unggul, kreatif, dan berdampak pada perekonomian masyarakat.

#### **1. Klasifikasi pariwisata dalam RIPDA**

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) ialah dokumen resmi yang berguna dalam penyusunan strategi pengembangan pariwisata. Berdasarkan narasumber, Sumbawa mengklasifikasikan pariwisatanya menjadi:

- Pariwisata Bahari: Destinasi Pantai, diving, dan snorkeling.
- Pariwisata Budaya: Situs-situs bersejarah serta Kerajaan lokal
- Minat khusus: Surfing, MXGP, serta sailing tourism

Pembagian ini bertujuan agar pembangunan pariwisata tidak berjalan secara acak, tetap sesuai dengan karakteristik serta potensi masing-masing tempat pariwisata.

#### **2. Peran masyarakat dalam promosi pariwisata**

Narasumber juga menyampaikan bahwasanya pemerintah ikut mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam mempromosikan pariwisata di Sumbawa. Seperti melalui media sosial yang lebih murah, lebih jujur (langsung dari masyarakat), dapat menjangkau secara luas melalui tiktok, youtube, dan media sosial lainnya.

#### **3. Tantangan yang masih dihadapi**

Selain dari potensi serta peran masyarakat, pemerintah daerah Sumbawa juga masih menemukan tantangan-tantangan yang perlu diatasi demi tercapainya visi pariwisata wilayah Sumbawa. Berdasarkan dari pernyataan narasumber, tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi antara lain:

- Sedikitnya infrastruktur, seperti kondisi jalan menuju tempat wisata yang masih rusak
- Kurangnya SDM pariwisata yang ahli yang menjadi hambatan dalam pelayanan serta pengelolaan yang maksimal.
- Ketergantungan terhadap event, seperti MXGP yang tidak bisa diandalkan terus menerus.



Namun narasumber menekankan bahwasanya pemerintah tetap peduli, akrena pariwisata bukan sektor pelengkap tapi bagian dari penggerak perekonomian, mendorong tumbuhnya UMKM, transportasi, dan lain sebagainya.

### **Keterbatasan Fiskal Daerah, Dan Strategi Akses Dana Pusat**

#### ***Fakta Anggaran Dan Strategi***

Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber, terdapat pernyataan dari narasumber mengenai keuangan daerah, khususnya Kabupaten Sumbawa. Dinyatakan bahwa total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Sumbawa berada pada kisaran Rp2 triliun, sedangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya sekitar 10% dari APBD, yaitu kurang lebih Rp200 miliar. Data ini disampaikan dalam konteks menjelaskan keterbatasan kapasitas pendanaan daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Jadi dapat dikatakan bahwa, sekitar 90% anggaran pembangunan di Kabupaten Sumbawa berasal dari transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan transfer lainnya yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Temuan dalam wawancara yang dilakukan menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, sebuah kondisi yang umum di banyak daerah di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Daerah-daerah seperti Sumbawa menghadapi keterbatasan dalam mengeksplorasi potensi pendapatan asli, baik karena keterbatasan struktur ekonomi, basis pajak yang sempit, maupun kurangnya infrastruktur pendukung investasi.

Ketika PAD sangat kecil, ruang fiskal daerah menjadi semakin sempit. Maksud dari "Ruang fiskal" disini adalah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara fleksibel sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal. Dengan PAD hanya 10%, berarti daerah hanya punya "uang sendiri" yang kecil, sementara "uang dari pusat" sudah dikunci penggunaannya oleh regulasi, misalnya dana alokasi khusus yang hanya tersedia untuk sektor tertentu. Konsekuensi yang dapat disebabkan dari masalah ini adalah :

1. Kebijakan daerah jadi sangat tergantung pusat. Jika pemerintah pusat lambat atau tidak merespons usulan daerah, maka program bisa tertunda atau tidak berjalan sama sekali.
2. Daerah sulit menangani kebutuhan mendesak, seperti bencana, wabah penyakit misalnya rabies yang sudah dijelaskan sebelumnya, atau pembangunan fasilitas darurat.
3. Tidak bisa improvisasi. Misalnya, muncul kebutuhan mendadak untuk membangun sekolah baru karena ledakan jumlah siswa. Tapi karena dana terbatas dan dana dari pusat belum turun, solusi pun tertunda.

Hal ini disebutkan secara jelas dalam wawancara, ketika disebutkan bahwa pembangunan jalan seperti Batu Dulang Tepal membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar, yang setara dengan seluruh PAD Kabupaten Sumbawa. Padahal, jalan bukan satu-satunya prioritas, masih ada kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, dan lain-lain. Maka jelas bahwa tanpa tambahan dukungan dari pemerintah pusat, daerah tidak punya kemampuan mandiri untuk membangun infrastruktur berskala besar.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal seperti itu, pemerintah daerah harus proaktif. Salah satu strategi yang diambil adalah menjadi "lokus" dari program-program nasional. Apa itu lokus?, lokus adalah istilah perencanaan yang merujuk pada lokasi atau titik fokus pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan. Ketika suatu daerah ditetapkan sebagai lokus, maka pemerintah pusat akan mengarahkan dana, program, dan sumber daya ke daerah tersebut. Kabupaten Sumbawa harus berusaha untuk menjadi lokus dikarenakan tidak semua daerah mendapatkan perhatian dari pusat. Pemerintah pusat memiliki ribuan daerah untuk dipilih dalam pelaksanaan program nasional. Menjadi lokus berarti daerah tersebut masuk dalam prioritas nasional, Memiliki akses yang lebih besar terhadap anggaran dan bantuan teknis, dan Menjadi mitra strategis kementerian dalam pelaksanaan program. Pemerintah sumbawa menyadari ini, jadi mereka aktif



mempromosikan diri sebagai Kawasan industri garam karena potensi geografis. Dan telah berhasil menjadi lokus pembangunan industri garam nasional, yang dimasukkan dalam RPJMN (Purwadinata & Ferdaus, 2024).

Namun, Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu ditunjuk oleh pusat. Mereka harus melakukan beberapa hal seperti:

**1. Pengajuan Program ke Musrenbangnas**

Musyawah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) adalah forum di mana usulan program daerah dibahas bersama pusat.

**2. Menyelaraskan Program Daerah dengan RPJMN**

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) adalah dokumen utama yang menentukan arah pembangunan nasional selama lima tahun. Jika program daerah sejalan dengan visi dan misi RPJMN, maka peluang mendapatkan dukungan pusat akan meningkat.

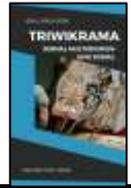
RPJMN disusun oleh pemerintah pusat dan dikoordinasikan oleh Bappenas. Dokumen ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan nasional dan menentukan prioritas pembangunan misalnya pendidikan atau yang lainnya, lokasi strategis untuk pembangunan nasional, dan besaran anggaran yang diterima (Dadang, 2014).

Pemerintah daerah harus masuk RPJMN karena dana besar yang ada di pusat. Dalam wawancara, disebutkan bahwa dari total APBN sebesar Rp3.300 triliun, hanya sekitar 25% ( $\pm$ Rp900 triliun) yang ditransfer ke daerah-daerah. Artinya, 75% dana pembangunan nasional tetap dikelola oleh kementerian/lembaga pusat. Jadi, jika daerah tidak menjadi bagian dari RPJMN maka daerah itu tidak akan menjadi perhatian kementerian, tidak akan mendapat alokasi program prioritas nasional, dan akan kalah bersaing dengan kabupaten/kota yang lain. Adapun Untuk dapat diintegrasikan dalam kebijakan pusat, Sumbawa menggunakan beberapa strategi diantaranya adalah:

- Pemerintah daerah menyusun RPJMD yang selaras dengan RPJMN. Penyelarasan ini bertujuan agar usulan program tidak bertentangan dengan agenda pusat, mendapatkan legitimasi dalam forum nasional, dan dianggap siap untuk dieksekusi (maturity-ready).
- komunikasi langsung antara pejabat daerah dengan pejabat pusat. Dalam wawancara, hal ini disampaikan secara jelas, meski sudah masuk RPJMN, kalau tidak ada komunikasi intensif, daerah bisa “kalah saing” dengan daerah lain. Komunikasi dapat berupa pertemuan, kunjungan kementerian, Koordinasi langsung dengan Bappenas, BPN, KKP, dan lainnya.
- Pemerintah daerah tidak hanya memberi permintaan, tetapi juga menunjukkan kesiapan. Hal ini bisa termasuk lahan, dukungan masyarakat, infrastruktur, hingga pendanaan sebagian oleh daerah.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional adalah titik temu antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah menyusun usulan program dan menyampaikannya ke pusat untuk dikaji dan dimasukkan dalam RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga).

Strategi ini efisien dikarenakan Daripada membuat program sendiri yang dananya tidak cukup, lebih baik menyambungkan diri ke program nasional yang sudah memiliki dana besar. Selain itu, Menjadi bagian dari RPJMN berarti daerah punya posisi strategis yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemban.

**Pendidikan dan Ekstrakurikuler Berbasis Potensi Lokal: Kurikulum yang Dekat dengan Budaya**



Pendidikan merupakan salah satu elemen paling krusial dalam membangun masyarakat yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, dengan beragamnya budaya dan tradisi yang ada, sangat penting untuk menggabungkan kearifan lokal ke dalam pendidikan. Wilayah nusantara yang kaya akan keanekaragaman budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal ini memiliki aset intelektual yang bisa dimanfaatkan dalam pendidikan formal, salah satunya adalah Ekstrakurikuler Berbasis Lokasi Beberapa sekolah di Sumbawa Barat mengembangkan Surfing sebagai ekstrakurikuler. Seperti penerapan pendidikan berbasis potensi lokal dapat dilihat di beberapa sekolah di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di daerah yang memiliki garis pantai dan ombak yang mendunia, surfing dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler resmi di sekolah-sekolah Sumbawa Barat. Program ini tidak hanya bertujuan menyiapkan calon atlet surfing untuk ajang nasional maupun internasional, tetapi juga mendorong pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Surfing sebagai ekstrakurikuler menjadi entry point untuk membangun ekonomi lokal pasca tambang, serta memperkuat peran sekolah dalam menyiapkan generasi muda yang mampu memanfaatkan potensi alam daerahnya.

kegiatan Heritage Walk yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa juga merupakan contoh ekstrakurikuler yang berbasis pada lokasi dan budaya. Dalam kegiatan ini, para pelajar diajak untuk mengenal dan menelusuri situs-situs bersejarah seperti museum, istana, dan bangunan peninggalan sejarah lainnya. Melalui Heritage Walk, siswa tidak hanya mempelajari sejarah secara teori, tetapi juga mengalami secara langsung kekayaan budaya Samawa, yang memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya daerah. Pendekatan pendidikan dan ekstrakurikuler berbasis potensi lokal seperti ini terbukti memberikan banyak manfaat. Siswa menjadi lebih termotivasi karena materi pembelajaran relevan dengan realitas mereka, keterlibatan masyarakat lokal dalam pendidikan meningkat, dan prestasi akademik siswa pun terdorong karena mereka merasa pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual ( Chotimah 2018 ).

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan bagian yang sangat penting dari Kurikulum Merdeka, yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. P5 bertujuan untuk membentuk pelajar yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga karakter dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keberagaman global, gotong royong, kemandirian, berpikir kritis, dan kreativitas. Dalam pelaksanaannya, P5 memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah yang ada di lingkungan sekitar secara kontekstual, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. P5 juga menekankan proses pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung peserta didik dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya pada hasil akhir proyek. Satuan pendidikan memiliki fleksibilitas dalam memilih tema proyek dan mengembangkan modul sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik dan konteks daerah masing-masing. Proses P5 mencakup tahapan pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi, yang mendukung penguatan kapasitas dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Selain itu, P5 juga mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia kerja dalam pelaksanaan proyek, sehingga pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga terhubung dengan kehidupan nyata di masyarakat.

Sementara itu, Pendidikan Kebudayaan dalam kerangka Kurikulum Merdeka dan P5 merupakan bagian dari usaha untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pendidikan Kebudayaan menekankan pentingnya pelestarian serta pengembangan kebudayaan lokal sebagai identitas bangsa dan juga sebagai modal sosial dalam membentuk karakter pelajar. Melalui pendidikan ini, peserta didik diajak untuk memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga



mereka tidak hanya menjadi pelajar yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian dan berbudaya. Pendidikan Kebudayaan juga mendukung pembelajaran kontekstual yang mengaitkan nilai-nilai budaya dengan kehidupan sehari-hari serta tantangan global, memperkuat jati diri pelajar sebagai warga negara Indonesia yang berkarakter dan bertanggung jawab sosial.

Di Sumbawa, implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sangat nyata dan relevan dengan konteks lokal melalui tema yang mengangkat sejarah Kesultanan Sumbawa. Melalui proyek ini, siswa diajak untuk mengenal secara mendalam tentang istana, struktur sosial, dan arsitektur adat Kesultanan Sumbawa dengan melakukan kunjungan ke bangunan-bangunan bersejarah seperti Istana Dalam Loka, Bala Datu Ranga, dan Museum Daerah Sumbawa. Kegiatan ini bukan hanya sekadar pembelajaran sejarah, tetapi juga merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pendidikan karakter, seperti gotong royong, kemandirian, dan rasa cinta tanah air. Dengan mengenal jati diri daerahnya, para pelajar tidak hanya memahami warisan budaya dan sejarah lokal, tetapi juga dipersiapkan untuk menjadi agen promosi wisata dan budaya yang mampu memperkenalkan serta melestarikan kekayaan budaya Sumbawa kepada masyarakat luas. Hal ini membangun rasa bangga terhadap daerahnya sekaligus memperkuat identitas budaya yang berakar pada nilai-nilai Pancasila ( Irwan 2017 ).

Kegiatan seperti heritage walk dan gelar karya siswa yang menampilkan hasil proyek P5 menunjukkan bahwa pembelajaran melalui proyek kontekstual ini efektif dalam membentuk karakter pelajar yang berintegritas dan berbudaya, serta siap berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, P5 di Sumbawa tidak hanya menguatkan kompetensi akademik, tetapi juga membangun kesadaran budaya dan sosial yang mendalam, menjadikan pelajar sebagai generasi penerus yang memahami dan menghargai akar budayanya serta siap menghadapi tantangan global dengan jati diri yang kuat.

### **Konflik Tenurial dan Kepemilikan Lahan**

Konflik tenurial merujuk pada sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak guna lahan antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan. Di Sumbawa, konflik ini sering kali muncul ketika pemerintah berencana untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), namun tiba-tiba muncul klaim dari masyarakat yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan warisan nenek moyang mereka. Klaim ini umumnya didasarkan pada hak ulayat atau kepemilikan adat yang telah ada sejak lama, sementara pemerintah menganggap lahan tersebut sebagai milik negara atau kawasan yang telah ditetapkan untuk kepentingan pembangunan. Situasi ini menciptakan ketegangan akibat perbedaan perspektif dan kepentingan antara masyarakat yang ingin mempertahankan hak tradisional mereka dan pemerintah yang memiliki rencana pembangunan. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik tenurial di daerah seperti Sumbawa juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial, kebijakan, dan kelembagaan, di mana masyarakat yang bergantung pada lahan untuk penghidupan merasa dirugikan jika lahan mereka diambil alih tanpa kompensasi yang adil atau tanpa adanya dialog yang memadai. Konflik ini tidak hanya bersifat horizontal antara masyarakat, tetapi juga vertikal antara masyarakat dan pemerintah, yang sering kali sulit diselesaikan karena adanya ambiguitas hukum dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak adat masyarakat setempat ( Watoni 2023 ).

Adapun contoh nyata dari Konflik Tenurial di Sumbawa PLTU Sumbawa-2 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbawa-2 sedang menghadapi sengketa lahan karena sebagian masyarakat mengklaim bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut merupakan tanah adat mereka. Klaim ini berlandaskan pada hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga masyarakat merasa memiliki hak atas lahan tersebut meskipun secara administratif tanah itu mungkin telah dikuasai oleh pemerintah atau perusahaan. Konflik ini menyebabkan



ketegangan antara pihak pengembang proyek dan masyarakat adat yang berusaha mempertahankan haknya. Kemudian Ropang dan Ranan di wilayah Ropang dan Ranan, lahan tambang yang direncanakan untuk dikembangkan juga menjadi sumber konflik karena dianggap sebagai tanah leluhur oleh masyarakat setempat. Bukti yang digunakan untuk mendukung klaim ini adalah adanya kuburan kuno di area tersebut, yang menunjukkan bahwa nenek moyang mereka telah lama tinggal dan mengelola lahan itu. Hal ini memperkuat posisi masyarakat dalam mempertahankan hak atas lahan tersebut, sehingga menimbulkan penolakan terhadap aktivitas penambangan yang akan dilakukan. di Kelampang, terdapat klaim lahan yang diajukan oleh warga baru setelah alat berat mulai beroperasi di lokasi untuk memulai proyek. Klaim ini sering kali muncul akibat kurangnya komunikasi dan sosialisasi sebelumnya, sehingga warga yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut secara tiba-tiba mengajukan keberatan. Situasi ini dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proyek karena konflik sosial yang timbul.

Terdapat Risiko dari Konflik Tenurial Konflik-konflik ini membawa risiko yang signifikan, seperti penghentian proyek pembangunan yang telah direncanakan, munculnya ketegangan dan konflik sosial di masyarakat, serta menurunnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut akibat ketidakpastian dan potensi kerugian yang tinggi. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan dan kemajuan ekonomi daerah.

#### **4. KESIMPULAN**

Kajian atas kondisi mutakhir Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen perencanaan, melainkan dari kemampuan menjahit kepentingan lokal ke dalam rancangan nasional tanpa kehilangan karakteristik wilayah. Pilihan paradigma negara kesejahteraan—dengan ekonomi kerakyatan sebagai sumbu—memperlihatkan bahwa Kabupaten Sumbawa berikhtiar melampaui logika pertumbuhan semata: layanan dasar, pengurangan kesenjangan wilayah, dan pemberdayaan koperasi ditempatkan sejajar dengan target PDRB. Keberpihakan ini terlihat pada prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, perumusan intervensi stunting lintas dinas, dan komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan hingga desa terpencil. Peran Bappeda sebagai koordinator, integrator, dan sinkronisator terbukti krusial dalam memastikan tiap perangkat daerah bergerak pada partitur yang sama, baik saat menyusun RPJMD maupun menanggapi Kejadian Luar Biasa seperti rabies.

Di sisi lain, ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pusat memaksa Pemerintah Kabupaten mengembangkan strategi cerdas untuk memperoleh alokasi dana dan program nasional—mulai dari aktif bernegosiasi pada Musrenbangnas hingga menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN. Upaya menjadi “lokus” industri garam nasional menunjukkan bahwa keterbatasan dapat diubah menjadi keunggulan kompetitif ketika daerah mampu menawarkan kesiapan lahan, dukungan masyarakat, dan komitmen politik yang jelas. Ke depan, sinergi lintas sektor, optimalisasi peran masyarakat dalam promosi pariwisata, dan penguatan kapasitas fiskal lokal melalui inovasi pendapatan menjadi kunci agar visi negara kesejahteraan yang digagas tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjelma kualitas hidup yang lebih setara bagi seluruh warga Sumbawa.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).

Dadang, S. (2015). Keterkaitan RPJMD dan RPJMN.



- Purwadinata, S., & Ferdaus, N. N. (2024). Harapan Pembangunan Smelter Menjadi Kawasan Industri dan Memperkuat UMKM Sumbawa Barat. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(11), 946-952.
- Setiawan, O. T. (2021). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 20-50.
- Siti Nur Ajizah & Endra Wijaya (2021). PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. *Jurnal Legal Reasoning*, 4 (1).
- Chotimah, U., Alfiandra, A., El Faisal, E., Sulkipani, S., Camelia, C., & Arpanudin, I. (2018). Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 19-25
- Media Sumbawa. (2022, 20 September). Siswa SMPN 1 Sumbawa kunjungi bangunan sejarah Kesultanan Sumbawa. *Media Sumbawa*.
- Bintangtv.id. (2025, 17 Mei). Gelar Karya Siswa SMPN 3 Sumbawa Dibuka, Ketua GOW Kabupaten Sumbawa Berikan Sambutan Inspiratif. *BintangTV.id*
- Watoni, H. (2023). Analisis eskalasi konflik tenurial dan faktor penyebabnya: Studi kasus Desa Sumi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur [Skripsi, Universitas Mataram]. *ePrints Universitas Mataram*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sutoro, E. (2017). *Desa Membangun Indonesia*. Pustaka Obor Indonesia.
- Ananta, A., Arifin, E. N., & Siregar, A. M. (2019). *Regional Development and Decentralization in Indonesia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Siti Nur Ajizah & Endra Wijaya. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1).
- Chotimah, U., et al. (2018). Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 19-25.
- Watoni, H. (2023). Analisis eskalasi konflik tenurial dan faktor penyebabnya: Studi kasus Desa Sumi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur